

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan Negara agraris yang sudah sejak lama menjadikan pertanian sebagai sumber devisa atau pendapatan negara, penyedia bahan baku, serta penyerap lapangan kerja. Terdapat 3 pilar yang menjadi pondasi didalam sektor pertanian di Indonesia yang pertama yaitu pemerintah, lalu selanjutnya swasta, dan yang terakhir adalah masyarakat atau petani. Peran pemerintah dalam memajukan sektor pertanian di Indonesia yaitu dengan membuat aturan-aturan atau regulasi yang bertujuan untuk mengontrol maupun mensejahterakan seluruh pihak yang berkaitan dengan bidang pertanian dan menyerap lapangan kerja melalui badan usaha milik Negara (BUMN). Selanjutnya peran swasta dalam keberlangsungan pertanian di Indonesia yaitu dengan melakukan bisnis dibidang pertanian melalui seluruh sumber daya yang dimiliknya sehingga diharapkan mampu untuk menyumbang devisa negara dan menyerap lapangan kerja. Kemudian yang terakhir peran masyarakat atau petani dalam keberlangsungan pertanian di Indonesia yaitu sebagai penyedia sumber daya manusia yang menjadi garda terdepan didalam keberlangsungan pertanian di Indonesia.

Didalam pelaksanaan kegiatan perkebunan di Indonesia, seringkali terjadi ketimpangan antara pihak swasta dan masyarakat disekitar area perkebunan atau biasa disebut dualisme pertanian. Dualisme pertanian dapat terjadi akibat hubungan timbal balik antara pihak perusahaan dan masyarakat disekitar perkebunan yang tidak terjalin dengan baik, sehingga sering terjadi ketimpangan dari berbagai sektor seperti ekonomi, teknologi, serta sektor lainnya. Akibat ketimpangan antara pihak perusahaan dan masyarakat disekitar perkebunan maka diharapkan pemerintah dapat menjadi penengah didalam hubungan Antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Menurut Fahamsyah (2018) perkebunan di Indonesia masih diliputi oleh dualisme, yaitu antara perkebunan besar dan masyarakat. Perkebunan besar menggunakan modal dan

teknologi yang intensif serta menggunakan lahan secara ekstensif lalu dengan manajemen yang eksploratif terhadap sumberdaya alam dan sumber daya manusia, sedangkan disisi lain perkebunan rakyat masih subsisten dan tradisional serta luas lahan yang terbatas. Kedua system tersebut menguasai bagian tertentu dari masyarakat dan keduanya hidup saling berdampingan, akibatnya tidak jarang terjadi perselisihan dan konflik diantara keduanya.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam usaha untuk mensejahteraikan masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan dengan menciptakan sistem ekonomi mandiri bagi masyarakat yang bergantung hidup di bidang perkebunan serta menciptakan hubungan yang baik antara masyarakat dengan pihak perusahaan, salah satu upaya pemerintah yaitu dengan membangun perkebunan rakyat yang tercantum dalam peraturan pemerintah republik Indonesia No. 44 tahun 1997 tentang kemitraan. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 1997).. Berdasarkan sejarah, pembangunan perkebunan rakyat sudah diusahakan sejak zaman pra kolonialisme hingga zaman kolonial. Dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1870, telah menjadikan perkebunan rakyat semakin berkembang di daerah sekitar perusahaan besar.

Salah satu komoditas pertanian yang sangat berfokus dalam pembangunan perkebunan rakyat dengan menjalankan sistem kemitraan yaitu kelapa sawit. Pada tahun 2016 lalu, luas area perkebuna kelapa sawit di Indonesia mencapai 11.201.465 hektar, dari total luas area tersebut sebanyak 42,31% merupakan milik perkebunan rakyat dan sisanya sebesar 57,69% merupakan milik perusahaan swasta dan milik perusahaan Negara. Kemitraan pada perkebunan kelapa sawit kemudian dipertegas melalui peraturan mentri

pertanian republik Indonesia No. 11/Pementan/OT.140/3/2015 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (Indonesian sustainable palm oil certification system/ISPO). ISPO merupakan suatu kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan system perkebunan berkelanjutan dengan memperhatikan dampak-dampak lingkungan. Salah satu poin yang terkandung dalam sertifikasi ISPO yaitu tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dimana perusahaan diwajibkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun dengan melakukan kemitraan usaha. Menurut Sumardjo, Sulaksana, dan Darmono (2004) terdapat 5 pola kemitraan dalam agribisnis, yaitu pola inti plasma, pola sub kontrak, pola dagang umum, pola keagenan, dan pola kemitraan kerjasama oprasional agribisnis.

PT. Bumitama Gunajaya Agro (BGA Group) merupakan perusahaan perkebunan yang bergerak sektor kelapa sawit. Secara umum BGA Group memfokuskan usahanya di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Riau. Salah satu cabang perusahaan BGA Group yang terletak di Kalimantan Barat, tepatnya di Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, melaksanakan system kemitraan dengan penduduk lokal yang terdiri dari 5 desa, yaitu desa Kayong Hulu, Betenung, Tajok Kayong, Kayong Utara, serta Kayong Tuhe. Sistem kemitraan tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2016 dengan menganut sistem pola inti plasma. Menurut Sumardjo, Sulaksana, dan Darmono (2004) Pola kemitraan inti plasma merupakan hubungan antara petani, kelompok tani, usaha. Perusahaan menyediakan lahan, saran produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sementara kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jabarkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang tingkat kepuasan dan strategi keberlanjutan petani plasma kelapa sawit dengan PT. Bumitama Gunajaya

Agro dalam rangka meninjau hasil pola kemitraan yang baru berjalan selama 5 tahun serta mengamati langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam penerapan strategi keberlanjutan petani plasma kelapa sawit di PT. Bumitama Gunajaya Agro.

B. Rumusan Masalah

Tingkat kepuasan dan strategi keberlanjutan petani plasma kelapa sawit terhadap pola kemitraan dengan PT. Bumitama Gunajaya Agro di Kecamatan Nanga Tayap menjadi salah satu bentuk penilaian terhadap pola kemitraan yang telah berjalan dari tahun 2016 tersebut. Dari latar belakang yang telah peneliti jabarkan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepuasan petani plasma terhadap pola kemitraan dengan PT. Bumitama Gunajaya Agro di Kecamatan Nanga Tayap?
2. Bagaimana strategi keberlanjutan petani plasma kelapa sawit PT. Bumitama Gunajaya Agro di Kecamatan Nanga Tayap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti jabarkan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kepuasan petani plasma terhadap pola kemitraan dengan PT. Bumitama Gunajaya Agro di Kecamatan Nanga Tayap.
2. Mengetahui strategi keberlanjutan petani plasma kelapa sawit PT. Bumitama Gunajaya Agro di Kecamatan Nanga Tayap.

D. Manfaat Penelitian

Harapannya setelah penelitian ini dilaksanakan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat, baik teoritis maupun praktis terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun manfaat yang ingin dicapai antara lain :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta kemampuan berfikir peneliti tentang tingkat kepuasan dan strategi keberlanjutan petani

plasma kelapa sawit terhadap pola kemitraan dengan PT. Bumitama Gunajaya Agro di Kecamatan Nanga Tayap.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan perusahaan khususnya PT. Bumitama Gunajaya Agro dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta pengembangan pola kemitraan dengan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat dan petani plasma tentang tingkat kepuasan petani plasma dan strategi keberlanjutan petani plasma kelapa sawit di PT. Bumitama Gunajaya Agro di Kecamatan Nanga Tayap.

